

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah									85.149.753.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	91		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								84.697.758.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.2	84.697.758.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						84.697.758.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.176.830.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.286.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	53.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				53.286.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	53.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					78.566.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	78.566.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.601.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.330.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	5.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.162.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	3.162.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.012.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	4.012.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.153.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	4.153.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58.308.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	58.308.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					750.107.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1		750.107.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
										3.077.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12		3.077.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
										149.030.000		
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		149.030.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
										598.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12		598.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						284.871.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	8		284.871.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					39.751.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6		39.751.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.220.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1		4.220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					7.600.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	1		7.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					230.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		230.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3.300.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		3.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		685.271.000		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34.800.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12		34.800.000		
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					34.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12		34.800.000		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		7.000.000		
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					7.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		7.000.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						37.432.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		37.432.000		
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.281.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		1.281.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				705.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	705.000		
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.640.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1.640.000		
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.612.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	5.612.000		
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				4.690.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1	4.690.000		
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.124.000		
						Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	2.124.000		
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21.380.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	2	21.380.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					55.432.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	55.432.000		
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55.432.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	55.432.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					381.076.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	381.076.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000		
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	70.000.000		
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				308.076.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	308.076.000		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					169.531.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	169.531.000		
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.709.000		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	6	38.709.000		
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	20.000.000		
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				30.822.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	0	30.822.000		
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	80.000.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	994.907.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1		45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					45.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1		45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						31.907.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		31.907.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.601.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1		6.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					9.250.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1		9.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12.300.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1		12.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material					1.006.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	1		1.006.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu					2.750.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	1		2.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Unit	6		14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.000.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1		14.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						843.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1		843.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					243.026.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1		243.026.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					600.374.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1		600.374.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.600.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4		60.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					17.600.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	8		17.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					43.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2		43.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		1.017.890.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1		34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					34.800.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12		34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						33.740.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		33.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.589.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12		4.589.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.103.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12		3.103.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1.924.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12		1.924.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material					3.927.000		
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	12		3.927.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu					1.637.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	12		1.637.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					18.560.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1		18.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.244.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0		36.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					36.244.000		
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0		36.244.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						666.688.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	27		666.688.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					960.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1		960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					176.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12		176.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					489.528.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12		489.528.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						246.418.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	12		246.418.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					21.835.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3		21.835.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.021.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	11		10.021.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.562.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	7		2.562.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				137.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		137.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		75.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100		1.103.918.000	Balai Keselamatan Kerja Kelas A
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.060.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	24		43.060.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.100.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	12		42.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.02.0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				960.000		
						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	12		960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					18.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.554.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		74.554.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.350.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12		8.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.266.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12		10.266.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.246.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12		6.246.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.585.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12		2.585.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37.107.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12		37.107.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					153.650.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Unit	5	153.650.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0005			Pengadaan Mebel				31.900.000		
						Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	6	31.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				87.750.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	87.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				34.000.000		
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	3	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					568.150.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	36	568.150.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.862.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.862.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.900.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	202.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				357.388.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	357.388.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					246.504.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	11	246.504.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				96.654.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	96.654.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				139.850.000		
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	139.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	78.107.291.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					70.032.455.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	70.032.455.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				69.218.861.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	450	69.218.861.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				686.220.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	686.220.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				88.714.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	88.714.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				38.660.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1		38.660.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					50.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	11		50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						21.128.000		
						Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	12		21.128.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.04.0007			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					21.128.000		
						Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	1		21.128.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						56.352.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100		56.352.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					18.150.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	12		18.150.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					8.202.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	1		8.202.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					25.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	100		25.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan					5.000.000		
						Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	50		5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.869.756.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100		1.869.756.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					42.026.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12		42.026.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					58.434.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12		58.434.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					69.053.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12		69.053.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					147.648.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12		147.648.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					24.849.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12		24.849.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					819.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	1		819.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0008			Fasilitas Kunjungan Tamu				16.662.000		
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	12	16.662.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				825.255.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	825.255.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				685.010.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	12	685.010.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					805.695.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	8	805.695.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				805.695.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	805.695.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.055.310.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	4.055.310.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.691.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	11.691.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				964.350.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	964.350.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				84.769.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	84.769.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.994.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	2.994.500.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.216.595.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1.216.595.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				293.100.000		
						Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	20	293.100.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0005			Pemeliharaan Mebel				26.902.000		
						Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	20	26.902.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				93.463.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	25	93.463.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				65.600.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	3	65.600.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				595.229.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	595.229.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.251.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	75.251.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.09.0011			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				67.050.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	67.050.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	1.611.651.000		Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					54.000.000			
						Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	1	54.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.000.000			
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	54.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					195.380.000			
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	195.380.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				27.188.000			
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	27.188.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				990.000			
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	990.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.273.000			
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	6	10.273.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.906.000			
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	31.906.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1.100.000			
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	1	1.100.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0007			Penyediaan Bahan/Material				10.375.000			
						Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	Paket	2	10.375.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				113.548.000			
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	1	113.548.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					86.875.000			
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	86.875.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				86.875.000			
						Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	3	86.875.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.040.821.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.040.821.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.920.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1.920.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				264.000.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	264.000.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				774.901.000			
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	774.901.000		SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					234.575.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	234.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				44.226.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	44.226.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69.904.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	69.904.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0007			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				53.750.000		
						Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit	4	53.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				66.695.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	66.695.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah</b>								<b>451.995.000</b>		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	451.995.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						451.995.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	451.995.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					451.995.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	5	451.995.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				302.436.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	302.436.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				149.559.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	149.559.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
<b>Meningkatkan Pengurangan Pengangguran</b>									<b>15.082.390.000</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	
						Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28.64		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	<b>Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan ( Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja )</b>								<b>2.008.667.000</b>		
						Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80.96	2.008.667.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						2.008.667.000		
						Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26.67	538.962.000		
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					538.962.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Laporan	60	538.962.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				538.962.000		
						Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Unit	60	538.962.000		
						Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89.59	1.469.705.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER	
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					1.469.705.000		
						Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	%	56.43	268.305.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
		2.07.06.1.01.0002			Pengawasan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				268.305.000		
						Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	260	268.305.000	SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	%	30	355.180.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.0003			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				355.180.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Unit	581	355.180.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
						Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	%	62.21	846.220.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
		2.07.06.1.01.0001			Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				846.220.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	1190	846.220.000	SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
	<b>Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>								<b>10.052.222.000</b>		
						Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	10.15	7.648.488.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						7.648.488.000		
						Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	30.59	108.505.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					108.505.000		
						Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	%	26.67	108.505.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.02.0001			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				108.505.000		
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Unit	30	108.505.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	3.2	1.884.283.000	Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					1.884.283.000		
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK	%	30	20.662.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				20.662.000		
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	2	20.662.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	%	10.2	1.513.621.000	SEKSI PELATIHAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.513.621.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	296	1.513.621.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				350.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	1	350.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	46.9801	2.539.450.000	Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					2.539.450.000		
						Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	%	33.33	18.518.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				18.518.000		
						Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	380	11.245.000	SEKSI PEMASARAN	
						Jumlah dokumen TNA	Dokumen	1	7.273.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri ) yang diberikan pelatihan	%	18.13	2.135.723.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2.135.723.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	272	2.135.723.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1	%	20	5.209.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				5.209.000		
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	4	5.209.000	SEKSI PEMASARAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	380.000.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				380.000.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	1	380.000.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9.5	2.691.904.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					2.691.904.000		
						Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans	%	40	3.845.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				3.845.000		
						Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Dokumen	3	3.845.000	SEKSI PEMASARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	%	64	2.529.525.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2.529.525.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	564	2.529.525.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	%	100	158.534.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				158.534.000		
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	75	158.534.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2.35	424.346.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					424.346.000		
						Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya	%	50	424.346.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				362.486.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	200	362.486.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				61.860.000		
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	5	61.860.000	SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	
						Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	Juta Rupiah	56.5	2.403.734.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						2.403.734.000		
						Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4.6	669.040.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					669.040.000		
						Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	%	20.67	669.040.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				669.040.000		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi / Peningkatan Produktivitas	Unit	475	669.040.000	SEKSI PRODUKTIVITAS	
						Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	%	13.22	1.734.694.000	Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A	
				Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					1.721.029.000		
						Jumlah lembaga ( penyedia dan pengguna tenaga kerja ) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga ( penyedia dan pengguna tenaga ) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen	Unit	19	14.651.000		
		2.07.03.1.01.0002			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				14.651.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Unit	1	14.651.000		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	3.42	1.706.378.000	SEKSI PEMASARAN	
		2.07.03.1.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				1.706.378.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	839	1.706.378.000	SEKSI PEMASARAN	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					9.940.000		
						Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	8	9.940.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.03.0001			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				9.940.000		
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Unit	5	9.940.000	SEKSI PELATIHAN	
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi					3.725.000		
						Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	%	4	3.725.000	SEKSI PELATIHAN	
		2.07.03.1.04.0001			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				3.725.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	3.725.000	SEKSI PELATIHAN	
	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah</b>								<b>161.535.000</b>		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	68.57	161.535.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						161.535.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	68.57	161.535.000	SEKRETARIAT	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					161.535.000		
						Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	31.43	161.535.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0001			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				74.049.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	74.049.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0003			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				40.644.000		
						Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Orang	35	40.644.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		2.07.02.1.01.0004			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				46.842.000		
						Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Orang	35	46.842.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
	<b>Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja</b>								<b>1.699.327.000</b>		
						Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71.06	1.699.327.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						1.561.617.000		
						Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	%	71.05	449.348.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					4.955.000		
						Persentase kenaikan izin LPTKS yang diterbitkan	%	20		4.955.000	
		2.07.04.1.02.0002			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS					4.955.000	
						Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	4		4.955.000	
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						444.393.000	
						Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	%	19.41		444.393.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA
		2.07.04.1.03.0001			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					94.313.000	
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1		94.313.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA
		2.07.04.1.03.0003			Job Fair /Bursa Kerja					350.080.000	
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100		350.080.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA
						Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	68.3		1.112.269.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
				Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota						935.293.000	
						Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	%	57.14		508.690.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA
		2.07.04.1.01.0001			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja					89.426.000	
						Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	70		89.426.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA
		2.07.04.1.01.0002			Pelayanan Antar Kerja					372.619.000	
						Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	80		372.619.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA
		2.07.04.1.01.0003			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					18.724.000	
						Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100		18.724.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA
		2.07.04.1.01.0004			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)					27.921.000	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	50		27.921.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA
						Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	%	47.5		426.603.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
		2.07.04.1.01.0005			Perluasan Kesempatan Kerja					426.603.000	
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	230		426.603.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi						169.400.000	
						Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	%	50		136.603.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
		2.07.04.1.04.0002			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik					20.079.000	
						Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan	15		20.079.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
		2.07.04.1.04.0004			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					116.524.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025				
								Target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
						Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	80		116.524.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Persentase calon pekerja migran Indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	%	1.51		32.797.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0001				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				28.277.000		
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	60		28.277.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
		2.07.04.1.04.0003				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				4.520.000		
						Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	2		4.520.000	SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
						Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				7.576.000		
						Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA ( Tenaga Kerja Asing )	%	100		7.576.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.1.05.0001				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				7.576.000		
						Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	150		7.576.000	SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							137.710.000		
						Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3.71		21.037.000	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A	
						Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				21.037.000		
						Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	%	80		21.037.000	SEKSI PELATIHAN	
		3.32.03.1.01.0006				Pelatihan Transmigrasi				21.037.000		
						Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian	Orang	10		21.037.000	SEKSI PELATIHAN	
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3.71		116.673.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA	
						Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				116.673.000		
						Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	%	8.57		116.673.000	SEKSI TRANSMIGRASI	
		3.32.03.1.01.0001				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				116.673.000		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1		116.673.000	SEKSI TRANSMIGRASI	OPD Provinsi
	<b>Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial</b>									<b>1.160.639.000</b>		
						Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	91.58		1.160.639.000		
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							1.160.639.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	98.2	173.250.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					173.250.000		
						Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	%	26.97	173.250.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.0001			Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial				62.931.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Unit	105	62.931.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.0002			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial				14.158.000		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Unit	105	14.158.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.07.05.1.01.0003			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				96.161.000		
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	140	96.161.000	SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
						Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.77	496.868.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					496.868.000		
						Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49.79	353.175.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				128.817.000		
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	30	128.817.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.0003			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				13.316.000		
						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Unit	1000	13.316.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
		2.07.05.1.02.0004			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi				211.042.000		
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Unit	36	211.042.000	SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL	
						Persentase perusahaan yang telah dibina pembuatan LKS Bipartit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	%	80	143.693.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.02.0005			Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				143.693.000		
						Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Unit	50	143.693.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96.69	158.382.000		
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					158.382.000		
						Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	%	96.69	47.272.000		
		2.07.05.1.02.0002			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				47.272.000		
						Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	125	47.272.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan	%	36	111.110.000		
		2.07.05.1.02.0001			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				111.110.000		
						Jumlah perselisihan yang dicegah	Kasus	222	111.110.000		OPD Provinsi ; DKI JAKARTA
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	45.54	332.139.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS	
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					332.139.000		
						Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	%	2.16	332.139.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.0001			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)				221.210.000		
						Jumlah Penetapan UMP	Laporan	1	221.210.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.0003			Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)				45.577.000		
						Jumlah penetapan UMK	Laporan	1	45.577.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.1.03.0005			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				65.352.000		
						Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	180	65.352.000	SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	
<b>JUMLAH</b>									<b>100.232.143.000</b>		